

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sodiki dan Yanis Maladi. 2009. *Politik Hukum Agraria*, Yogyakarta: Mahkota Kata.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- A.P. Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung. Mandar Maju.
- A. Suriyaman Mustari Pide. 2006. *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar. PUKAP-Indonesia.
- Bachtiar Effendi. 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- Boedi Harsono. 2016. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1, cetakan 3*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Darwin Ginting. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Effendi Perangin. 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Muriyianto. 2013. *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan ke 1*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 16.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai*

Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik terjemahan Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Irawan Soerodjo. 2007. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

J. Andy Hartono, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cetakan 1, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Jimmy Joses Sembiring. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Visi Media.

K Wantjik Saleh. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maria S.W. Sumarjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta: Andi Offset.

_____. 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady, 2013, *Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.

Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Salim, HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudargo Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka Karunika.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group.

_____. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet 2, Jakarta: kencana.

_____. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada media Group.

Valerine, J.L.K. 2009. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Widhi Handoko. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan; Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media.

Artikel dan jurnal

Arlene Agustina.et.al, 2018, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Penandatanganan Akta Jual Beli Yang Didasari Atas Blangko Kosong (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/Pdt/2016)*. Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No. 2 Tahun 2018. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera, 2017, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, hlm. 134-146

Fredrik Mayor Saranaung. 2017. *Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997*. Lex Crimen Vol. IV No. 1. Januari-Februari 2017.

M. Adib Luthfi dan Akhmad Khisni, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayaranannya*, Jurnal Akta Vol. 5 No. 1. Maret 2018, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mustamu, Julista, 2011, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni.

Slamat Saur Tua Ricky Nainggolan.et.al. 2019. *Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex suprema Vol. 1 No. 2. September 2019. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Sulthon Akim. 2018. *Kajian Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Akta Autentik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. Jurnal Penelitian Ipteks Vol. 3 No. 1. Januari 2018. Universitas Muhammadiyah Jember.

Internet

Notaris Cimahi. *Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pendaftaran Tanah*. <https://notariscimahi.co.id/ppat/tugas-dan-fungsi-ppat-dalam-pendaftaran-tanah>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 16.00 WITA.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 17 Februari 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 31 /PB.01/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

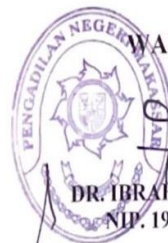
DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dwi Laksa Marabintang.**
Nomor Pokok : B022182025
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul : **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Balik
Nama Sertifikat Hak Atas Tanah.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 07 Februari 2022 Nomor : 1377/UN4.5.1/PT.01.04/2022 .



DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BETSY SIRUA, SH
NOTARIS & PPAT
JL. SUNGAI SADDANG NO. 1D
TELP. (0411) 3620178 FAX. (0411) 3627091
MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 26/N/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BETSY SIRUA, SH

Jabatan : Notaris/PPAT

Menerangkan bahwa :

Nama : DWI LAKSA MARABINTANG

Nomor Pokok : B022182025

Program : Magister (S2) Kenotariatan

Judul : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor kami Notaris/PPAT BETSY SIRUA, SH pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022. Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Maret 2022

Notaris/PPAT


BETSY SIRUA, SH



Suzanti Lukman, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | AHU.990.AH.02.01.Tahun 2013

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020/SL-IPPAT/III/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Laksa Marabintang
Nomor Pokok : B022182025
Program : Magister (S2) Kenotariatan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Kantor Saya guna penulisan tesis dengan judul : PEMBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Maret 2022



SUZANTI LUKMAN, S.H., M.Kn

